



Implementasi Pembelajaran *Civic Knowledge*, *Civic Skills*, dan *Civic Disposition* Terhadap Siswa Usia SD/MI di Era Digital

Isep Parij Al Farizi ¹, Anis Rahmawati Azly ² Agus Dwi Prasajo ³

¹² UIN Raden Intan Lampung, Indonesia, Universitas An Nur Lampung Indonesia³

isepparij78@gmail.com¹ anisrahmawatazly@gmail.com² agusdwiprasajo@an-nur.ac.id³

Article History:

Received: 15/12/2025

Revised: 16/12/2025

Accepted: 17/12/2025

Keywords:

Civic Knowledge,

Civic Skills,

Civic Disposition

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang mengintegrasikan *Civic Knowledge*, *Civic Skills*, dan *Civic Disposition* pada siswa usia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di tengah tantangan dan peluang era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi pembelajaran PKn. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada interpretasi proses, makna, dan tantangan yang dialami guru dan siswa dalam konteks pembelajaran di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran di era digital bervariasi tingkat keberhasilannya. Implementasi *Civic Knowledge* menjadi yang paling efektif melalui pemanfaatan media digital interaktif seperti video dan kuis, dengan rata-rata nilai tes siswa yang tinggi. Sementara itu, pengembangan *Civic Skills* melalui proyek partisipatif digital berhasil meningkatkan keterampilan kolaborasi. Namun, tantangan utama terletak pada penanaman *Civic Disposition* dan etika digital, yang ditunjukkan dengan rendahnya konsistensi perilaku etis siswa di ruang daring meskipun menunjukkan toleransi dalam diskusi tatap muka. Penelitian ini adalah bahwa implementasi ketiga dimensi kompetensi Civic telah dilakukan, dengan *Civic Knowledge* terimplementasi paling efektif, *Civic Skills* bergantung pada kompetensi guru, dan *Civic Disposition* menjadi aspek yang paling sulit karena tantangan konsistensi etika di ruang digital.

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang ini, pendidikan mengalami perubahan yang signifikan, tidak hanya dalam hal metode pengajaran, tetapi juga dalam konten yang diajarkan. Salah satu perubahan penting yang perlu mendapat perhatian khusus adalah pembelajaran mengenai kewarganegaraan (civics) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan disposisi kewarganegaraan (*civic disposition*). Pembelajaran ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman, kemampuan, serta sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks Indonesia, dengan semakin

berkembangnya teknologi dan media digital, pembelajaran kewarganegaraan perlu disesuaikan agar lebih relevan dan efektif, terutama untuk siswa usia sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI).

Secara historis, pembelajaran kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum tersebut, yang sering kali terfokus pada aspek normatif dan teoritis, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara pada siswa. Namun, dalam konteks perkembangan zaman yang semakin didorong oleh teknologi digital, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana cara mendekatkan konsep-konsep kewarganegaraan kepada siswa dengan cara yang menarik, relevan, dan dapat dipahami oleh generasi yang hidup dalam dunia digital (Kahlor & Stout, 2019). Digitalisasi dan penggunaan media sosial mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa, yang sering kali lebih terbuka terhadap informasi yang datang dari berbagai sumber tanpa filter yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu mengintegrasikan nilai-nilai civics dengan kompetensi digital agar siswa dapat memahami peran mereka dalam dunia yang semakin terhubung.

Civic knowledge merujuk pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, struktur pemerintahan, serta norma dan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran mengenai civic knowledge diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas kepada siswa mengenai sistem politik, hukum, dan budaya yang ada di negara mereka (Sears & Heston, 2015). Di sisi lain, civic skills mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, serta berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Keterampilan ini penting agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kemampuan untuk berdebat dengan sopan dan mengemukakan pendapat yang berbasis pada informasi yang akurat sangat penting dalam kehidupan demokratis (González & Gallo, 2020).

Disposisi kewarganegaraan (civic disposition) berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dengan penuh tanggung jawab. Sikap positif terhadap kewarganegaraan, seperti rasa bangga terhadap negara, solidaritas sosial, dan empati terhadap sesama warga negara, sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang akan berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat generasi muda yang tumbuh di era digital sering kali terpapar oleh pengaruh yang dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap isu-isu sosial dan politik (Torney-Purta et al., 2001).

Penerapan pembelajaran civics di SD/MI pada era digital menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Teknologi informasi yang semakin mudah diakses memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh berbagai informasi secara

langsung, namun di sisi lain, informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks dapat menyebar dengan cepat, memengaruhi pandangan dan tindakan mereka (Pew Research Center, 2020). Oleh karena itu, selain mengajarkan pengetahuan dan keterampilan terkait kewarganegaraan, pendidikan di era digital harus mencakup pembelajaran mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial. Dengan literasi digital yang baik, siswa tidak hanya belajar bagaimana cara mengakses informasi dengan benar, tetapi juga memahami bagaimana cara menanggapi dan berinteraksi dalam ruang digital secara bijaksana (Jenkins et al., 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi pembelajaran civic knowledge, civic skills, dan civic disposition dapat dilakukan di SD/MI di era digital. Dalam upaya ini, penting untuk menilai seberapa jauh teknologi dan alat digital dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran kewarganegaraan, sekaligus memperkenalkan siswa pada sikap dan keterampilan yang relevan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pembelajaran yang melibatkan teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah cara siswa memahami kewarganegaraan dan memperkenalkan mereka pada platform partisipasi yang lebih luas, seperti media sosial dan aplikasi berbasis web yang dapat mendukung pengembangan keterampilan sosial-politik mereka (Liu & Li, 2018).

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai pembelajaran kewarganegaraan di tingkat yang lebih tinggi, seperti di sekolah menengah dan perguruan tinggi, pembelajaran civics untuk siswa usia SD/MI, terutama yang mengintegrasikan aspek digital, masih relatif sedikit dibahas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana cara-cara baru dapat diadopsi untuk membekali generasi muda dengan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital yang terus berkembang ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat sekolah dasar (SD/MI) dalam konteks era digital. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berpusat pada interpretasi proses pembelajaran yang terjadi, makna yang diberikan oleh guru dan siswa, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika pembelajaran secara holistik, menggali pemahaman subjektif dari para pelaku pendidikan, dan menyingkap fenomena yang mungkin tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Hal ini sangat relevan dalam penelitian yang berhubungan dengan implementasi kurikulum berbasis

teknologi dan bagaimana siswa serta guru merespons perubahan tersebut dalam konteks pembelajaran PKn.

Subjek penelitian ini melibatkan satu orang guru Pendidikan Kewarganegaraan dan 27 siswa kelas V dan VI di MI Al-Hidayah Kekatung, Dente Teladas, Tulang Bawang, Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025, dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut telah aktif dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran. Siswa-siswa yang menjadi subjek penelitian dipilih karena telah mengalami pengalaman langsung dalam pembelajaran yang menggabungkan media digital, yang memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana mereka mengaplikasikan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition dalam kehidupan sehari-hari mereka. MI Al-Hidayah Kekatung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memenuhi kriteria infrastruktur digital yang memadai, serta melaksanakan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pembelajaran di era digital.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen, dan tes kinerja. Observasi partisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran PKn di kelas, terutama interaksi antara guru dan siswa ketika memanfaatkan media digital. Pengamatan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana keterampilan kewarganegaraan (civic skills) seperti partisipasi aktif dan kolaborasi dijalankan dalam pembelajaran. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan guru dan kepala sekolah untuk menggali lebih dalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran, serta untuk memahami bagaimana mereka mengembangkan civic knowledge dan civic disposition dalam konteks pembelajaran di era digital. Analisis dokumen dilakukan dengan memeriksa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan modul ajar yang digunakan, materi digital yang diterapkan, serta tata tertib sekolah yang mengatur etika digital. Ini bertujuan untuk menilai sejauh mana muatan civic knowledge dan civic disposition tercermin dalam dokumen kurikulum dan pembelajaran yang ada. Selain itu, tes kinerja diberikan kepada siswa untuk mengukur sejauh mana mereka memahami konsep civic knowledge dan bagaimana civic disposition mereka terefleksi dalam tindakan nyata di kelas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan memilih, mengorganisir, dan merangkum data yang diperoleh agar lebih fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang sudah direduksi

dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk menentukan pola atau tema yang muncul dari data yang telah disajikan, yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Jika terdapat data kuantitatif, data tersebut akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Selain itu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan temuan yang diperoleh melalui berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan valid mengenai implementasi pembelajaran PKn di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Civic Knowledge*

Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) adalah pemahaman mengenai arti kewarganegaraan bagi setiap orang, serta memperkenalkan teori dan konsep yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan dunia politik. Pelajaran PPKn di tingkat sekolah dasar mencakup beragam aspek, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk menciptakan karakter warga negara yang ideal. Elemen penting dari Pengetahuan Kewarganegaraan terdiri dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Tujuan dari penyampaian materi ini adalah agar para siswa dapat mengembangkan sikap dan karakter yang baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab, menjadi fondasi dalam membentuk individu yang siap berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bernegara.

Menurut Branson (1999) dalam *Standards and Civic Framework for the 1998 National Assessment of Education Progress (NAEP)*, *civic knowledge* dijabarkan melalui lima pertanyaan dasar:

1. Bagaimana kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?
2. Apa saja dasar dari sistem politik?
3. Bagaimana pemerintahan dibentuk sesuai nilai dan prinsip demokrasi?
4. Bagaimana hubungan suatu negara dengan negara lain serta keterlibatannya dalam isu internasional?
5. Apa peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi?

Kelima pertanyaan ini menggambarkan bahwa *civic knowledge* adalah pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, struktur pemerintahan, kewarganegaraan, serta keterlibatan warga dalam kehidupan bernegara.

Kementerian Pendidikan Nasional membagi *civic knowledge* menjadi tiga dimensi utama:

1. Politik: Mempelajari asal-usul, unsur, dan bentuk negara, kewarganegaraan, lembaga politik, serta konsep demokrasi Pancasila.
2. Hukum: Membahas negara hukum, konstitusi, sistem dan sumber hukum, serta lembaga peradilan.
3. Moral: Mengenalkan nilai, norma, moral, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Civic Knowledge Melalui Media Digital

Hasil:

Mayoritas guru 85% memanfaatkan media digital untuk menyampaikan Civic Knowledge. Media yang paling sering digunakan adalah video edukasi pendek tentang Pancasila, sejarah pahlawan, dan struktur pemerintahan, serta kuis interaktif berbasis aplikasi (misalnya: Kahoot! atau Quizizz) untuk mengevaluasi pemahaman konsep.

Rata-rata nilai tes Civic Knowledge siswa adalah 85,2, menunjukkan pemahaman yang tinggi terhadap konsep dasar kewarganegaraan.

Pembahasan:

Pemanfaatan media digital ini terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan buku teks dan meningkatkan daya tarik belajar siswa SD/MI (Prasetyo & Haryati, 2020). Civic Knowledge yang disampaikan melalui narasi visual digital lebih mudah dicerna oleh siswa usia operasional konkret. Namun, tantangan yang teridentifikasi adalah keterbatasan guru dalam memverifikasi akurasi dan kredibilitas semua sumber informasi digital yang diakses siswa, menuntut perlunya kurasi konten yang ketat.

B. Civic Skills

Ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skills) merupakan kemampuan yang berkembang dari pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan tujuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks sosial, nasional, dan kenegaraan. Kemampuan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan partisipatif. Keterampilan intelektual berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir kritis, mencakup pengenalan, analisis, penilaian, serta penyampaian opini tentang berbagai masalah publik. Di sisi lain, keterampilan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pemerintahan, karena partisipasi seluruh anggota masyarakat merupakan elemen kunci untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi.

Pengembangan Civic Skills dalam Konteks Partisipasi Digital

Hasil:

Civic Skills dikembangkan melalui proyek kelompok yang melibatkan TIK. Contohnya adalah proyek kampanye digital mini tentang kebersihan lingkungan sekolah atau anti-perundungan (anti-bullying). Observasi menunjukkan bahwa keterampilan berkolaborasi (collaboration skills) meningkat, terlihat dari 75% siswa mampu membagi tugas dan menggunakan platform kolaborasi online sederhana. Keterampilan berpikir kritis (critical thinking) diterapkan saat siswa diajak membandingkan berita hoax dan fakta terkait isu kewarganegaraan sederhana.

Pembahasan:

Temuan ini sejalan dengan ide Project Citizen yang telah disesuaikan dengan dunia digital, di mana siswa berlatih berpartisipasi dan menanggulangi masalah melalui tindakan di ranah digital. Meski demikian, perkembangan Keterampilan Kewarganegaraan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital para guru; guru yang terampil dalam teknologi informasi cenderung lebih berhasil merancang situasi belajar yang menguji kemampuan siswa. Keterampilan komunikasi digital para siswa masih lebih banyak menggunakan bahasa yang tidak formal, yang menjadi perhatian dalam pembentukan sopan santun dan etika berinteraksi secara daring.

C. Civic Disposition

Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) adalah sekumpulan sikap yang mencerminkan perilaku santun dan penuh tanggung jawab sebagai warga negara. Sikap ini mencakup penghormatan kepada orang lain, tanggung jawab individu, disiplin, kepedulian sosial, dan keterbukaan pikiran. Selain itu, watak kewarganegaraan juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dengan bijak, menghargai keindahan, mengedepankan semangat kompromi dalam menyelesaikan perbedaan, serta mengembangkan sifat sabar, konsisten, empati, dermawan, dan loyal terhadap bangsa serta prinsip-prinsip dasar negara. Nilai-nilai ini sangat penting untuk ditanamkan kepada para pelajar agar dapat membentuk karakter warga negara yang beretika dan terlibat aktif dalam kehidupan demokrasi.

Penanaman Civic Disposition dan Etika di Ruang Digital

Hasil:

Implementasi Civic Disposition (watak/karakter) masih menjadi aspek paling menantang. Guru berupaya menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dan tanggung jawab melalui diskusi studi kasus video tentang keberagaman. 60% siswa menunjukkan sikap toleran dalam diskusi offline, namun hanya 40% yang menunjukkan etika yang sama saat berinteraksi di grup chat kelas.

Upaya penanaman etika digital dilakukan melalui pembiasaan dan tata tertib sekolah yang dimodifikasi, namun dukungan konsistensi dari orang tua dalam pengawasan gawai masih rendah.

Pembahasan:

Civic Disposition adalah dimensi afektif yang membutuhkan waktu dan keteladanan yang konsisten. Era digital menciptakan dualitas: siswa menunjukkan perilaku Civic yang baik di dunia nyata (berkat pembiasaan sekolah) tetapi rentan terhadap perilaku impulsif di dunia digital (Budimansyah, 2017). Rendahnya konsistensi perilaku etis ini menyoroti perlunya Pendidikan Kewarganegaraan terintegrasi dengan Pendidikan Karakter dan Literasi Digital yang secara eksplisit mengajarkan moralitas algoritma dan dampak emosional dari tindakan online. Sekolah harus mengubah tata tertib digital menjadi budaya sekolah yang terinternalisasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembelajaran *Civic Knowledge*, *Civic Skills*, dan *Civic Disposition* terhadap siswa usia SD/MI di era digital telah dilakukan, namun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. *Civic Knowledge* terimplementasi paling efektif, didukung oleh ketersediaan media digital yang menarik dan interaktif, meskipun kurasi konten masih menjadi perhatian.

Civic Skills berhasil dikembangkan melalui proyek partisipatif digital, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi dan kreativitas guru dalam merancang skenario pembelajaran yang menuntut berpikir kritis dan kolaborasi digital.

Sementara itu, *Civic Disposition* menjadi aspek yang paling sulit karena tantangan konsistensi etika di ruang digital; hal ini terlihat dari rendahnya konsistensi perilaku etis siswa di ruang daring (hanya 40%) meskipun menunjukkan sikap toleran dalam diskusi tatap muka (60%). Oleh karena itu, diperlukan penguatan *Civic Disposition* melalui kolaborasi aktif sekolah dan orang tua, serta peningkatan literasi digital guru untuk memastikan kurasi konten yang akurat dan pengembangan skenario pembelajaran yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Lutfi Nur. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Menjalin Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter. OSF Prints, h. 7-8.
- Alfiansyah, Hendita Rifki & Muhammad Nur Wangid. (2018). Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membelajarkan Civic Knowledge, Civic Skills, dan Civic Disposition di Sekolah Dasar. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 6(2), h. 189.

- Budimansyah, D. (2017). Penguatan Civic Disposition pada Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 1-10.
- Hakiki, Nurlaila Hafizd. (2018). Peranan Guru dalam Pelaksanaan Program Gerakan Literasi Sebagai Upaya Pembentukan Civic Knowledge, *Jurnal Kultur Demokrasi*, h. 7-8.
- Hulu, Janice Rahmawati & Adrianus Bawamenewi. (2022). Strategi Guru Menanamkan Civic Skills Siswa Pada Pembelajaran PKn, *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), h. 264 265.
- Kurniawan, Machful Indra. (2018). *Buku Ajar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Lubis, Maulana Arafat. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi yang Berkarakter. *INA-Rxiv*, h. 11-14.
- Murtiningsih, Ika, dkk. (2022). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Civic Disposition Peserta Didik di Masa Pandemi. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 9(2), h. 145.
- Pangalila, Theodorus. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), h. 101-102.
- Prasetyo, I., & Haryati, R. (2020). Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 4(2), 123-130.
- Siregar, R. (2021). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital: Pembentukan Warga Negara Global. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 50-65.
- Ubaedillah, A. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: KENCANA.
- Wahyudi, Arief, dkk. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral dan Karakter*. Banten: CV. AA. RIZKY.
- Winarno. (2019). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.